



21 Ribu Peserta JKN-PBI Dinonaktifkan



LANCAR: Suasana pelayanan untuk mengurus BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta.

Bersumber dari APBN, Pemkot Buka Layanan Pemulihan

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Pencabutan pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat menimpa 21 ribu warga Kota Yogyakarta. Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka layanan pemulihan kepesertaan JKN-PBI tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menjelaskan, sejak tanggal 1 Februari 2026 ada 21 ribu peserta PBI JKN yang dinonaktifkan. Khususnya, peserta yang iurannya dibiayai oleh APBN.

■ **Baca 21 RIBU...** Hal II



Emma Rahmi Aryani
Kepala Dinkes
Kota Yogyakarta



Nurcahyo Nugroho
Anggota Komisi D DPRD
Kota Yogyakarta

21 Ribu Peserta JKN-PBI Dinonaktifkan

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Kami tahu setelah peserta hendak menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan status kepesertaan dinyatakan tidak aktif," kata Emma, akhir pekan lalu.

Emma mengatakan, usai ada permasalahan tersebut, pihaknya membuka layanan pemulihan mulai Senin 2 Februari 2026. Layanan ini dibuka di Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Yogyakarta dengan menyiapkan tujuh petugas Jamkesda. Setiap hari, layanan dibatasi maksimal 350 pemohon.

"Selain melalui MPP, pemulihan kepesertaan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) serta layanan WhatsApp pada jam kerja," kata Emma.

Untuk layanan pemulihan kepesertaan JKN-PBI ini, menurutnya, dinkes memprioritaskan warga dengan kondisi medis darurat. Seperti pasien hemodialisis dan kemoterapi.

"Kami mendahulukan warga yang darurat. Mereka kami segerakan untuk diaktifkan kembali," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan warga atas penonaktifan kepesertaan JKN-PBI.

"Kami mendapatkan informasi, persoalan tersebut bukan karena adanya efisiensi anggaran. Penonaktifan ini dilakukan menyusul adanya

verifikasi dan pemutakhiran data kesejahteraan oleh pemerintah pusat agar bantuan jaminan kesehatan tepat sasaran," jelasnya.

Kebijakan itu, lanjut Nurcahyo, mengacu pemeringkatan kesejahteraan berbasis desil dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Dalam pemeringkatan ini, sistem desil ini dibagi tingkat kesejahteraan rumah tangga menjadi 10 kelompok. Desil 1 sampai 4 menggambarkan kondisi ekonomi paling miskin dan rentan. Sedangkan desil 5 sampai 10 menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

"Yang dicoret itu penerima dengan status di atas desil 5, atau kategori menengah warga

yang dinonaktifkan langsung digantikan oleh masyarakat lain yang dinilai lebih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan," katanya.

Atas masalah itu, Nurcahyo memastikan, mendukung langkah Pemkot Yogyakarta untuk mengalihkan peserta PBI dari APBN ke APBD Kota Yogyakarta. Bahkan, jika anggaran yang ada saat ini kurang, dewan siap menambahkan di APBD Perubahan.

"Desil lima ini mereka jika harus membiayai sendiri kesulitan. Karena banyak yang digunakan untuk berobat rutin. Makanya, APBD akan disiapkan untuk membiayai jika terjadi kekurangan," katanya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005